
**PENGEMBANGAN *COMMUNITY BASED ECONOMIC DEVELOPMENT* SEBAGAI
UPAYA PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) 2030**
(Studi Deskriptif Pada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)

Neny Susanti

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Abstract

This study aims to describe of Community Based Economic Development (CBED) in the UPPKS group, as well as the constraints that occur in the development. In addition, this study analyzes the contribution of CBED-based UPPKS groups as an effort to achieve the first goal of Sustainable Development Goals (SDG's) 2030, namely "No Poverty" in Jombang Regency in particular and in Indonesia in general. This research uses the grand theory of economic development, community development and sustainable development using empowerment approach. CBED concept in this research has 3 aspects namely 1) Knowledge Improvement 2) Leadership Style, and 3) Provision of Assistance. This research uses descriptive qualitative research. Data collection techniques used were observation methods, document studies, and in-depth interviews with informants. Determination of informants using purposive sampling with the parties that are considered most know related to the development of UPPKS group in Jombang regency ie Population and Family Planning Department (DPPKB) as the executor of UPPKS, UPT DPPKB as the executor of field development of UPPKS group, Association of UPPKS Group as a container oversees the UPPKS group, and the UPPKS group as its target.

The results of this study indicate, in terms of Community Based Economic Development (CBED), UPPKS development in Jombang regency is done through 3 strategies, namely increasing insight and knowledge, determination of leadership style, and providing UPPKS group assistance. There are still various obstacles in the development of UPPKS groups such as administrative management that have not been managed properly, lack of guidance, group members who do not pay the installment of capital, lack of assistance of Appropriate Technology Tools (ATTG), lack of marketing insight, lack of commitment and group awareness. Furthermore, the contribution of CBED-based UPPKS groups as an effort to achieve SDGs for the first "without poverty" objective in Jombang Regency has so far had an economic impact on the increase of people's incomes, the social impacts of the surrounding environment and the impacts for the development of the business itself. Achievements are made with community participation in innovation to exploit available potential, government role in subsequent policy, and capital or infrastructure support to support group development to improve welfare and reduce poverty level

Key Words : Community Based Economic Development (CBED), Economic Development, Sustainable Development Goals (SDG's)

PENDAHULUAN

Sampai dengan abad ke-21, kemiskinan masih menjadi beban dunia terutama jika dikaitkan dengan isu kesenjangan yang semakin melebar. Pada dasarnya kemiskinan mengindikasikan adanya permasalahan yang lebih mendasar yakni ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang pada akhirnya akan memberi dampak pada permasalahan lainnya.

Dunia merespon permasalahan ini dengan mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan *The Millenium Development Goals* (MDG's) pada tahun 2000 yang diikuti 189 negara di dunia. MDG's memiliki 8 target utama yang dilaksanakan pada rentang waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2015. Berakhirnya era MDG's pada tahun 2015, masih

terdapat tujuan MDGs yang belum bisa dicapai negara-negara di dunia tak terkecuali di Indonesia, sehingga ditetapkan SDG's (*Sustainable Development Goals*) sebagai komitmen dunia untuk memantapkan capaian-capaian yang harus ditanggulangi bersama. Era SDGs memiliki rentang waktu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2030 dengan 17 target utama yang diikuti 193 negara.

Salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah perbedaan antara nilai kemiskinan relatif dan nilai kemiskinan absolut. Dalam hubungan dengan lokasi geografis, kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan kemiskinan relatif didefinisikan sebagai kondisi miskin karena pengaruh kebijakan

pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Berikut ini adalah tabel angka kemiskinan absolut di Indonesia yang berkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera yang memiliki populasi penduduk terpadat di Indonesia :

Tabel I.1
Angka Kemiskinan Absolut di Indonesia di Pulau Jawa dan Sumatera

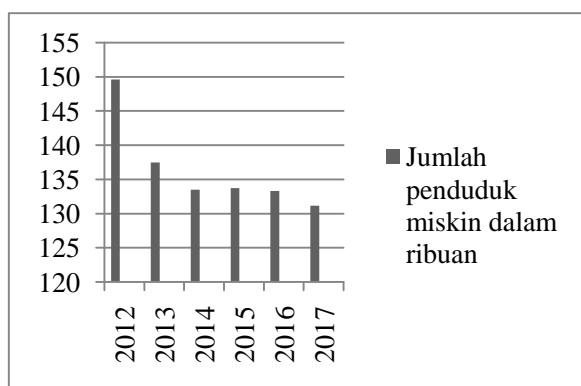
Provinsi	Orang Miskin (dalam juta)
Jawa Timur	4,78
Jawa Tengah	4,51
Jawa Barat	4,49
Sumatera Utara	1,51
Nusa Tenggara Timur	1,16

Sumber : BPS Per maret 2016

Jawa Timur dengan jumlah penduduk 39 075.20 ribu jiwa dengan sekitar 4,7 juta penduduk berpenghasilan rendah membuat provinsi Jawa Timur berada di urutan teratas daerah yang memiliki penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Lebih dari 3,2 juta penduduk miskin Jawa Timur berada di pedesaan. Sementara 1,5 juta tersebar di kota-kota besar.

Lokus penelitian ini adalah wilayah Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang menjadi lokus penelitian ini karena masih banyak penduduk miskin yang terdapat di wilayah Kabupaten Jombang seperti yang dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik I.2
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2012 -2017



Sumber : BPS Jawa Timur 2017 (diolah penulis)

Berdasarkan grafik diatas, penduduk miskin di Kabupaten Jombang mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Hal

yang menarik menurut peneliti adalah telah banyak program-program pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Jombang yang telah dilakukan, namun jumlah keluarga miskin masih tergolong tinggi.

Pembangunan ekonomi salah satu cara bagi setiap negara jika ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar yang terstruktur dari negara melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dapat dimulai dari tingkatan yang paling kecil yakni keluarga. Pembangunan keluarga sejahtera merupakan upaya menyeluruh dan terpadu yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat meningkatkan fungsinya secara optimal. Sedangkan yang dimaksud dengan kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar mencapai keluarga sejahtera.

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah badan pemerintah yang menangani keluarga membuat sebuah program Keluarga Berencana (KB) untuk menekan pertumbuhan laju penduduk. Apabila peserta KB tidak dikelola dengan baik, dampak negatifnya adalah masyarakat tidak mendapatkan umpan balik atau *feedback* dari program KB sehingga peserta KB akan semakin turun. Sebagai kelanjutan dari program KB, BKKBN membentuk program UPPKS yang merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga peserta KB.

Melalui program UPPKS, pemerintah memberikan bantuan penguatan modal yang bersifat pinjaman kepada masyarakat tersebut. Dengan pinjaman tersebut harapannya masyarakat penerima bantuan dapat menggunakan untuk menciptakan usaha baru maupun memperbesar modal atas usaha yang dimilikinya agar kesejahterannya meningkat dan salah satu langkah memberantas kemiskinan. Bagi wilayah dengan tingkat kesertaan KB yang masih rendah, UPPKS juga memiliki daya ungkit terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesertaan dalam program KB.

Program UPPKS di kabupaten Jombang telah ada sejak tahun 1992 namun dengan nama

Takesra, Takukesra yang kemudian berubah menjadi UPPKA pada tahun 1994 dan pada tahun 2000-an berganti nama menjadi UPPKS. Program UPPKS memiliki dasar hukum UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Dan terdapat *Peraturan Kepala BKKBN Nomor ; 15/HK.010/B5/2009* tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). UPPKS di Kabupaten Jombang dikelola dan dikoordinasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan mitra kerja perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. UPPKS dikelola dalam Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Setiap kecamatan di Kabupaten Jombang memiliki kelompok UPPKS. Kecamatan Peterongan dengan luas wilayah 29,47 km² memiliki jumlah penduduk 67.177 jiwa. Jumlah peserta KB pada Kecamatan Peterongan sebanyak 10.203 jiwa dari total 12.767 Pasangan Usia Subur (PUS). Kecamatan Peterongan memiliki 5 Kelompok UPPKS yakni Kelompok UPPKS Mandiri, Kelompok UPPKS Barokah, Kelompok UPPKS Flamboyan, Kelompok UPPKS Bugenvil, dan Kelompok UPPKS Anyelir. Berdasarkan sumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Jombang, kelompok UPPKS di Kecamatan Peterongan jika dilihat dari segi SDA, SDM dan kelembagaannya paling baik di Kabupaten Jombang. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan Kelompok UPPKS guna meningkatkan eksistensi dan produktivitasnya.

Terdapat 3 studi terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian ini. Pertama, jurnal penelitian yang berjudul “Model Pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Dalam Upaya Peningkatan Akseptor KB” yang ditulis oleh Mardiyono, Peneliti Madya Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini adalah : pertama, pelaksanaan UPPKS telah sesuai dengan kebijakan pusat dan BKKBN. Kedua, Proses pembentukan kelompok UPPKS dilakukan oleh PLKB dengan melakukan survei dan seleksi berdasarkan kriteria. Ketiga, Untuk kesinambungan kelompok sangat dipengaruhi adanya sumber modal. Keempat, Persepsi masyarakat terhadap tujuan bantuan bidang ekonomi (UPPKS) adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga, memberi modal kerja dan melatih kewirausahaan. Kelima, Untuk pembinaan BKKBN dapat melakukan

dengan kerjasama lintas sektor, khusus pembinaan kelompok di bidang KB dan kesehatan dapat dilakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Jajarannya. Keenam, UPPKS memberikan dampak pada peningkatan pendapatan keluarga dan kesejahteraan anggotanya.

Studi terdahulu kedua, jurnal penelitian berjudul “Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis “*Community Based Economic Development*” (Studi pada pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo) yang ditulis oleh Moch. Rochjadi Hafiluddin, Suryadi, dan Choirul Saleh. Hasil penelitian ini adalah diperlukan strategi pemberdayaan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tepat adalah dengan pendekatan strategi pemberdayaan UMKM berbasis komunitas serta dipikirkan segala aspek penunjangnya.

Studi terdahulu ketiga, ditulis oleh Abdullah Abidin dalam jurnal yang berjudul “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah” memberikan kesimpulan bahwa dalam pengembangan UMKM sebagai kekuatan strategi dalam mempercepat pembangunan daerah, *pertama*; potensi pengembangan UMKM di daerah sangat besar. *Kedua*; pengembangan UMKM harus dilakukan sesuai budaya lokal dan potensi yang dimiliki oleh daerah. *Ketiga*; sektor UMKM sangat berperan dalam menanggulangi masalah sosial di daerah dengan menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. *Keempat*; peningkatan SDM, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran, akses informasi, dan manajemen sangat penting dalam mengembangkan UMKM. *Kelima*; SDA dan SDM serta pasar dunia yang semakin terbuka pada era global merupakan potensi besar jika adanya strategi replikasi yang meliputi kerjasama jaringan pemerintah, LSM, swasta dan individu maupun kelompok yang dikelola dalam bentuk kemitraan.

Dari beberapa uraian diatas, maka dalam penelitian ini mengidentifikasi pengembangan kelompok UPPKS yang dalam penelitian ini dilihat dengan perspektif *Community Based Economic Development* dimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi sangat berperan penting dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, diharapkan pengembangan kelompok UPPKS sehingga dapat memberikan

kontribusi terhadap pencapaian SDGs tahun 2030 tujuan pertama yakni “Tanpa Kemiskinan”.

KERANGKA TEORI

Pembangunan

Menurut Michael P. Todaro dalam Suryana, pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Menurut Sondang P. Siagian, pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam pembinaan bangsa.

Apabila diamati secara cermat, maka muncul dipermukaan pembangunan paling sedikit 7 ide pokok, yakni :

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari suatu yang bersifat tanpa akhir.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai suatu hal yang akan dilaksanakan.
3. Pembangunan dilaksanakan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek dimasa mendatang.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pertumbuhan dimaksud sebagai peningkatan kemampuan
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Semua hal yang telah disinggung diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semangkin kukuh

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang terencana dan terkoordinasi yang akan menghasilkan ide, kemajuan, dan perubahan besar dalam struktur sosial, ekonomi

dan kelembagaan secara nasional untuk menuju ke arah yang lebih baik..

Pembangunan Ekonomi ((*Economic Development*))

Secara singkat Adam Smith mengatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Sedangkan Simon Kuznets menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah kemampuan suatu negara dalam menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya secara jangka panjang. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional.

Dari beberapa pengertian diatas maka peneliti mengambil simpulan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka yang panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam hal teknologi, kelembagaan, maupun pola pikir masyarakat.

Pembangunan Masyarakat

Korten dalam Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, menyatakan konsep pembangunan berpusat pada manusia yang memandang inisiatif kreatif dari manusia sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Selanjutnya Korten mengemukakan tiga tema penting yang dianggap menentukan bagi konsep perencanaan yang berpusat pada manusia, yaitu:

- 1) Penekanan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
- 2) Kesadaran bahwa walaupun sektor modren merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagai besar rumah tangga miskin
- 3) Kebutuhan akan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal.

Pembangunan Berkelanjutan

Definisi pembangunan berkelanjutan menurut Sudarmadji adalah pembangunan untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sedangkan definisi pembangunan berkelanjutan menurut Salim adalah pembangunan yang harus diarahkan pada pemberantasan kemiskinan (sasaran ekonomi), perimbangan: ekuitas sosial yang adil (sasaran sosial) dan kualitas tinggi, kehidupan lingkungan hidup (sasaran lingkungan). Untuk ini secara sadar diusahakan investasi dalam modal: ekonomi (finansial, modal mesin, dll), modal sosial (investasi pendidikan, kesehatan dan keakraban sosial) dan modal lingkungan (investasi-sumber daya alam diperbaharui dan daur-ulang serta substitusi sumber daya alam yang tak terbaharui).

Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan :

1. Keberlanjutan Sosial (*Social Development*)
2. Keberlanjutan Lingkungan (*Environmental Development*)
3. Keberlanjutan Ekonomi (*Economic Development*)

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu aktivitas yang sengaja direncanakan dan dilaksanakan oleh negara di masa kini dan masa yang akan datang yang diarahkan untuk kesejahteraan manusia

Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan berbasis masyarakat adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis, paradigma ini memberi peran kepada individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengarahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan. Pembangunan berbasis masyarakat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa masyarakat dan ciri khas setempat.

Untuk mencapai hal tersebut, muncul teori pemberdayaan masyarakat yang diapandang sebagai pemaknaan alternatif terhadap pembangunan. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup dengan hanya upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi

serta memperbaiki empat akses yaitu : akses terhadap sumber daya, teknologi, pasar dan sumber pembiayaan. Keempat akses tersebut disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi masyarakat.

Pembangunan Ekonomi Berbasis Masyarakat (*Community Based Economic Development*)

Terdapat tiga alasan penting yang dapat menjadi acuan penerapan *Community Based Economic Development* (CBED) dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat diantaranya :

1. Efisiensi
Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dapat dikatakan efisien apabila masyarakat sendiri yang merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan.
2. Memperkuat Rasa Tanggung Jawab Masyarakat
Hal ini dilakukan untuk memberikan kemandirian kepada masyarakat yang berasas kegotong royongan.
3. Masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhannya dan pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator.

Menurut Saleh, strategi pengembangan *Community Based Economic Development* (CBED) dapat dilakukan melalui :

1. Peningkatan Pengetahuan

Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dalam pengembangan usaha. Peningkatan pengetahuan dalam konsep CBED dapat digunakan untuk mengenali dan memahami terhadap kekuatan dan kelemahan dalam ekonomi lokal dan aset ekonomi potensial yang masih tersembunyi dalam suatu wilayah.

2. Penerapan Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan aspek penting untuk mencapai dan meningkatkan keberhasilan kepemimpinan seseorang dalam suatu organisasi. Dalam strategi pengembangan konsep CBED, gaya kepemimpinan merupakan sebuah cara menyatukan sumber daya manusia, pengetahuan dan dana dari

pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka memenuhi tujuan bersama.

3. Pemberian Bantuan

Pemberian bantuan dapat berupa modal, sarana dan prasarana serta jasa. Pengiriman bantuan dan/jasa kepada daerah, khususnya pada kegiatan industri perorangan akan diberikan apabila lembaganya masih belum bisa memenuhi kebutuhan daerahnya.

Keterkaitan Pembangunan Ekonomi Masyarakat dengan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu syarat yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi yang dinamis. Melalui pemberdayaan, masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya.

Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang dapat dilakukan dengan konsep pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah dan kelompok masyarakat berperan sebagai *partner* guna merangsang kegiatan ekonomi yang telah dilakukan sehingga tumbuh dan berkembang dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan sebagai upaya mengurangi tingkat kemiskinan sebagaimana tujuan SDGs yang pertama yakni “Tanpa Kemiskinan”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Jombang. Adapun waktu pengumpulan data lapangan dilakukan pada bulan Februari hingga April 2018. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dan *snowball*. Pemilihan informan secara *purposive* atau disebut *key informan* berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam bidang penanganan keluarga sejahtera. Sedangkan informan secara *snowball* ditemukan ketika melakukan wawancara dengan *key informan*. Metode analisis data menggunakan model analisis *Miles & Huberman* yaitu pengumpulan data, penyajian data dan kesimpulan. Fokus penelitian ini adalah pendekatan *Community Based Economic Development* dengan mengalisa pengembangannya pada kelompok UPPKS,

kendalanya serta kontribusinya dalam penanganan kemiskinan sebagai upaya pencapaian SDGs 2030.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) berbasis *Community Based Economic Development (CBED)*

1. Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan

Kegiatan dalam peningkatan pengetahuan dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan mengenai administrasi kelompok UPPKS, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, dan pemasaran.

Administrasi diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha kelompok, kegiatan administrasi kelompok perlu dibuat secara rapi, tertib, dan benar. Pelatihan kewirausahaan diberikan kepada seluruh anggota dan pengurus kelompok UPPKS untuk meningkatkan kemampuan anggota sesuai dengan bidang usahanya, dan mendorong minat usaha anggota bagi kemajuan usaha kelompok. Untuk mengembangkan usaha ekonomi kelompok UPPKS terdapat beberapa kegiatan diantaranya pembinaan, mengikuti dan mengadakan lomba usaha ekonomi produktif, sosialisasi serta talkshow dengan bidang lain. Pemasaran merupakan unsur yang penting dari suatu usaha kelompok dan menentukan kelangsungan kegiatan usaha ekonomi produktif kelompok UPPKS. Bentuk pemasaran yang dilakukan melalui dua cara yakni promosi secara online dan ditawarkan secara langsung pada konsumen.

2. Penerapan Gaya Kepemimpinan

Untuk meningkatkan perkembangan usaha ekonomi kelompok UPPKS dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan, maka DPPKB Kabupaten Jombang membentuk sebuah wadah yang menaungi kelompok UPPKS se-kabupaten Jombang yang bernama BPC AKU (Badan Pengurus Cabang Asosiasi Kelompok UPPKS), penerapan gaya kepemimpinan dapat dilakukan dengan membangun komunikasi antar anggota dan pengurus, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kelompok. Untuk menguatkan usaha yang dikembangkan kelompok maka dibutuhkan jaringan kemitraan yang dilakukan melalui pemimpin. Dan untuk meningkatkan akses yang setara oleh seluruh kelompok UPPKS maka dibutuhkan adanya partisipasi aktif dari anggota dan pengurus serta pendampingan dari pemerintah.

3. Pemberian Bantuan Kelompok UPPKS

Pengiriman bantuan kepada kelompok UPPKS ditujukan kepada kelompok yang memiliki kegiatan usaha ekonomi perorangan maupun kelompok yang masih belum bisa memenuhi kebutuhannya sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Pemberian bantuan pada kelompok UPPKS dapat berupa bantuan modal serta peralatan atau sarana dan prasarana dalam mengembangkan usahanya.

Kendala-kendala dalam pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) berbasis *Community Based Economic Development (CBED)*

1. Aspek Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan
 - a. Masih minimnya pembinaan kepada pengurus maupun anggota kelompok UPPKS yang disebabkan karena jarak yang terlalu jauh, waktu yang kurang tepat, dan kepentingan-kepentingan lainnya.
 - b. Pengelolaan administrasi dan keuangan kelompok yang belum terkelola dengan baik.
 - c. Rendahnya wawasan dan pengetahuan dalam bidang pemasaran dan peningkatan daya saing produk.
2. Aspek Penerapan Gaya Kepemimpinan
 - a. Adanya anggota kelompok yang tidak membayar angsuran modal, akan berdampak pada perputaran modal yang berkurang dan kecemburuan dari anggota lain yang setiap bulan mengangsur pinjaman modal yang diterimanya.
 - b. Masih kurangnya jumlah pendamping kelompok UPPKS dalam mengembangkan usaha.
3. Aspek Pemberian Bantuan Modal
Minimnya bantuan ATTG (Alat Teknologi Tepat Guna) yang diterima.

Kontribusi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) berbasis *Community Based Economic Development (CBED)* sebagai upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* di Kabupaten Jombang

Kontribusi kelompok UPPKS sebagai upaya pencapaian SDGs di Kabupaten Jombang belum tercapai atau terlaksana dengan baik, sejauh ini masih hanya memberikan dampak ekonomi pada peningkatan pendapatan masyarakat, dampak sosial lingkungan sekitar dan dampak bagi pengembangan usaha yang

sedang dikembangkan. Sedangkan untuk kontribusi secara keseluruhan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jombang, namun memberikan pengaruh terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Kabupaten Jombang.

Berikut ini merupakan penjelasan teoritis antara pengembangan CBED sebagai upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui kelompok UPPKS :

- a. Keberlanjutan Lingkungan
Kegiatan ekonomi produktif melalui kelompok UPPKS sedikit memberikan dampak terhadap lingkungan. Hal tersebut dikarenakan jenis usaha yang dikembangkan kelompok UPPKS di Kecamatan Peterongan hanya terbatas kegiatan ekonomi produktif seperti menjual makanan, menjual sayur, menjahit, membuka toko bahan pokok dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok UPPKS tidak memberikan dampak lingkungan seperti kualitas udara, kualitas air, ekosistem, bahan kimia yang berwawasan lingkungan, dan sebagainya.
- b. Keberlanjutan Sosial
Kelompok UPPKS memberikan dampak sosial terhadap lingkungan sekitar dengan memberdayakan masyarakat dengan mengambil tindakan melakukan kegiatan ekonomi produktif, membangun kemitraan dengan pihak luar, menggunakan proses yang terbuka dan transparan yang melibatkan pemangku kepentingan terkait pengembangan usaha. Meningkatkan pengetahuan anggota untuk keberlanjutan usahanya, merubah pola pikir masyarakat untuk memikirkan keberlanjutan masa depan.
- c. Keberlanjutan Ekonomi
Pembangunan dan keberlanjutan ekonomi memiliki keterkaitan dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi diantaranya adalah menggunakan sumber daya alam sebagai modal. Sumber daya alam yang tersedia tetap dimanfaatkan tanpa mengurangi nilai ekonomi di masa depan. Selain pada sumber daya alam, pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok UPPKS dapat dilihat dari segi *supply and demand* dimana kegiatan ekonomi dalam memainkan harga tawar atau perubahan cara promosi akan meningkatkan kegiatan ekonomi serta kesejahteraan sosial.

Dengan adanya kelompok UPPKS, keberlanjutan usaha anggota kelompok UPPKS juga memberikan dampak dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kesimpulan

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dibentuk dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga. Proses pembentukan kelompok UPPKS dilakukan oleh PLKB dengan melakukan pendataan dan survey kepada masyarakat berdasarkan pedoman yang telah tersedia dengan kriteria yakni Pasangan Usia Subur (PUS), Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tingkat I, diutamakan perempuan, memiliki usaha, serta akseptor KB.

Dalam konsep *Community Based Economic Development (CBED)*, terdapat 3 upaya pengembangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kelompok UPPKS di Kabupaten Jombang yang diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan dapat dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan seperti pelatihan terhadap administrasi kelompok UPPKS (Buku Induk Anggota, Buku Simpan Pinjam, Buku Kas Harian, dll), penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemasaran.
2. Penerapan Gaya Kepemimpinan. penerapan gaya kepemimpinan dilakukan dengan membentuk asosiasi kelompok UPPKS sebagai wadah kelompok UPPKS se Kabupaten Jombang, membangun komunikasi antar anggota kelompok UPPKS, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kelompok UPPKS, mengadakan jaringan kemitraan dengan pihak lain, melakukan pendampingan kelompok UPPKS, serta meningkatkan partisipasi anggota kelompok UPPKS dalam segala kegiatan guna meningkatkan usaha yang dikembangkan. Pemimpin dan gaya kepemimpinannya mempengaruhi kebijakan serta kegiatan dalam pelaksanaan program pemberantasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan keluarga.
3. Pemberian bantuan pada kelompok UPPKS dapat berupa bantuan modal serta peralatan atau sarana dan prasarana.

Dalam pengembangan UPPKS berbasis *Community Based Economic Development (CBED)* di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang terdapat beberapa kendala yang di hadapi diantaranya sebagai berikut :

1. Masih minimnya pembinaan kepada pengurus maupun anggota kelompok UPPKS yang disebabkan karena jarak yang terlalu jauh, waktu yang kurang tepat, dan kepentingan-kepentingan lain dari anggota kelompok UPPKS.
2. Pengelolaan administrasi dan keuangan kelompok yang belum terkelola dengan baik.
3. Rendahnya wawasan dan pengetahuan dalam bidang pemasaran dan peningkatan daya saing produk.
4. Adanya anggota kelompok yang tidak membayar angsuran modal, akan berdampak pada perputaran modal yang berkurang dan kecemburuan dari anggota lain yang setiap bulan mengangsur pinjaman modal yang diterimanya.
5. Minimnya bantuan ATTG (Alat Teknologi Tepat Guna) yang diterima.
6. Permasalahan yang berkaitan dengan komitmen serta kesadaran dalam mengembangkan kelompok UPPKS.

Dalam SDGs dinyatakan bahwa *no poverty* (tanpa kemiskinan) merupakan poin pertama yang menjadi prioritas, hal tersebut dapat diartikan bahwa dunia tak terkecuali dengan negara Indonesia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun. Meningkatnya pendapatan keluarga melalui program UPPKS dengan cara membentuk kelompok UPPKS merupakan salah satu program pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan. Kontribusi kelompok UPPKS sebagai upaya pencapaian SDGs di Kabupaten Jombang sejauh ini memberikan dampak 1) Ekonomi pada peningkatan pendapatan masyarakat, 2) Dampak sosial lingkungan sekitar dan 3) Dampak bagi pengembangan usaha yang sedang dikembangkan. Sedangkan untuk kontribusi secara keseluruhan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jombang, namun memberikan pengaruh terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Kabupaten Jombang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan kelompok UPPKS di Kabupaten Jombang masih perlu perbaikan dan melakukan berbagai inovasi agar kedepannya dapat lebih berkembang. Oleh karena itu, berdasarkan temuan di lapangan, peneliti memberikan beberapa saran kepada pemerintah terkait sebagai berikut :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan koordinasi lintas sektor dengan semua pihak dari tingkatan bawah sampai atas dalam pengembangan usaha kelompok UPPKS. Pihak-pihak yang terlibat diharapkan mampu berjalan beriringan dan melakukan koordinasi dengan baik supaya usaha yang dikembangkan anggota kelompok UPPKS berjalan dengan baik.
2. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan kepada pengurus dan anggota kelompok UPPKS untuk meningkatkan kemampuan sesuai bidang usaha. Pembinaan yang dapat dilakukan seperti pembinaan administrasi dan pembukuan agar anggota dapat mengerjakan pembukuan kegiatannya lebih sistematis; pembinaan organisasi agar dapat mengikuti kegiatan kelompok secara aktif; pembinaan permodalan agar dapat menggunakan modal untuk mengembangkan usaha secara maksimal, dan mematuhi aturan peminjaman; pembinaan usaha ekonomi produktif agar selalu berusaha meningkatkan mutu hasil usaha; dan pembinaan pemasaran agar mampu memanfaatkan dan menciptakan peluang pasar.
3. Perlu adanya indikator untuk menilai keberhasilan suatu kelompok. Misalkan dari terpenuhinya administrasi kelompok UPPKS dalam hal tingkat pendapatan yang dapat digunakan menjadi tolok ukur kesejahteraan keluarga.

Daftar Pustaka

- Saleh, Choirul. 2013. Bahan DIKLAT Strategic Planning For Development.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur
- DPPKB Kabupaten Jombang : Pencapaian Peserta KB Aktif Bulan Desember 2017, Lap.C/I-PLKB-12
- Mardikanto, Tatok dan Poerwoko Soebianto. 2013. Pemberdayaan Masyarakat: dalam perspektif kebijakan publik. Alfabeta.
- Sudarmaji. 2008. Pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup dan otonomi daerah. <http://geo.ugm.ac.id/archives/125>
- Salim, Emil. 1986. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: LP3ES.
- Suryana. 2000. Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan. Jakarta: Salemba Empat. Hal. 55
- Wijaya, Adi. 2003. Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: P2E-LIPI.